

Strategi Holistik Penguatan Ideologi Pancasila: Sinergi Pendidikan, Keteladanan Elite, dan Internalisasi Nilai

Lasro Dearma Br Simbolon¹ Tyara Alini Putri² Rahmad Darmawan Alamsyah NST³
Ihsan Mubarok Simatupang⁴ Garda Ali Pulungan⁵ Hironius Asyer Keith Aritonang⁶ Sri
Yunita⁷

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

Email: -

Abstract

This article discusses the concept of Pancasila as a state ideology, the challenges of its implementation in the era of globalization, and strategies for strengthening Pancasila values. Based on a literature review of various national journals, research shows that Pancasila remains relevant as a philosophical and moral foundation for Indonesia. However, globalization brings challenges such as the degradation of cultural values, the penetration of foreign ideologies, and the weakening of the morality of the younger generation. Therefore, strengthening Pancasila values through education, exemplary leadership, and public policy is an urgent need.

Keywords: Pancasila, State Ideology, Implementation, Globalization, Public Policy

Abstrak

Artikel ini membahas konsep Pancasila sebagai ideologi negara, tantangan implementasi di era globalisasi, serta strategi penguatan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan kajian literatur dari berbagai jurnal nasional, penelitian menunjukkan bahwa Pancasila tetap relevan sebagai dasar filosofi dan moral bagi Indonesia. Namun, globalisasi membawa tantangan berupa degradasi nilai budaya, penetrasi ideologi asing, hingga melemahnya moralitas generasi muda. Oleh karena itu, penguatan nilai Pancasila melalui pendidikan, keteladanan pemimpin, dan kebijakan publik menjadi kebutuhan mendesak.

Kata Kunci: Pancasila, Ideologi Negara, Implementasi, Globalisasi, Kebijakan Publik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang majemuk memerlukan suatu fondasi ideologis yang kokoh untuk mempersatukan keberagaman dan membimbing perjalanan bangsa menuju cita-cita nasional. Dalam konteks ini, Pancasila hadir bukan hanya sekadar rumusan filosofis, melainkan sebagai jiwa dan identitas kolektif bangsa Indonesia yang merepresentasikan sintesis nilai-nilai luhur dari seluruh khazanah kebudayaan Nusantara (Nasoha et al., 2024). Sejarah panjang perumusan Pancasila, yang melalui proses dialektika intensif para pendiri bangsa, menunjukkan keseriusan dalam meletakkan dasar negara yang mampu mengakomodasi realitas pluralistik Indonesia sekaligus menjawab tantangan zaman (Sitanggang, 2024). Sebagai ideologi negara, Pancasila berfungsi sebagai kerangka normatif yang mengatur hubungan antara negara dan warganya, sekaligus menjadi kompas moral dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Azikin, 2018). Karakter Pancasila sebagai ideologi terbuka—yang tidak kaku maupun dogmatis—merupakan kekuatan utamanya, memungkinkan adaptasi nilai-nilai dasar dalam menghadapi perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi tanpa kehilangan esensi jati dirinya (Nasoha et al., 2024). Sifat dinamis inilah yang membuat Pancasila dirancang untuk tetap relevan dari masa ke masa, meskipun dalam praktiknya, interpretasi dan implementasinya sering kali menghadapi ujian yang tidak ringan.

Perjalanan sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan menunjukkan fluktuasi dalam pemahaman dan penerapan Pancasila. Pada era Orde Lama, Pancasila mengalami distorsi melalui pendekatan Nasakom yang berusaha memadukan nasionalisme, agama, dan komunisme—suatu upaya yang pada hakikatnya kontradiktif dengan nilai-nilai dasar Pancasila sendiri (Azikin, 2018). Di periode Orde Baru, Pancasila justru diinstrumentalisasi sebagai alat legitimasi kekuasaan melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), yang meskipun berhasil menanamkan Pancasila secara formal, namun cenderung melakukannya melalui pendekatan indoktrinatif dan represif (Azikin, 2018). Memasuki era Reformasi, sebagai reaksi terhadap masa lalu, terjadi pendulum balik di mana Pancasila justru mengalami marginalisasi dalam diskursus publik dan kebijakan negara, dan sering dianggap sebagai produk Orde Baru yang tidak relevan lagi (Sucipto & Najicha, 2024).

Tantangan kontemporer yang dihadapi Pancasila semakin kompleks dan multidimensi. Arus globalisasi dan revolusi digital telah membawa serta nilai-nilai eksternal seperti individualisme radikal, konsumerisme, materialisme, serta liberalisme kapitalistik yang berpotensi mengikis nilai-nilai kegotongroyongan, kekeluargaan, dan keadilan sosial yang menjadi jiwa Pancasila (Eliza et al., 2024). Disrupsi teknologi informasi dan media sosial telah menciptakan ruang publik yang fragmentatif, rentan terhadap penyebaran hoaks, ujaran kebencian, politik identitas, serta radikalisme yang mengancam persatuan nasional (Eliza et al., 2024). Di tingkat kebijakan, sering terjadi ketidakselarasan antara nilai-nilai Pancasila dengan praktik pemerintahan, dimana Pancasila kerap hanya menjadi slogan retorik tanpa diimplementasikan secara substantif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik (Azikin, 2018). Namun demikian, di tengah kompleksitas tantangan tersebut, justru semakin terlihat betapa relevannya nilai-nilai Pancasila sebagai penuntun dan solusi. Pancasila dengan kelima silanya menawarkan paradigma alternatif yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berkelanjutan dibandingkan dengan ideologi-ideologi impor yang sering kali menciptakan berbagai masalah sosial dan lingkungan (Sitanggang, 2024). Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan landasan spiritualitas dan toleransi di tengah masyarakat multireligius; Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menegaskan komitmen pada hak asasi manusia dan peradaban; Sila Persatuan Indonesia memperkuat ketahanan nasional menghadapi disintegrasi; Sila Kerakyatan menawarkan model demokrasi yang bermartabat dan substantive; dan Sila Keadilan Sosial menjadi kritik terhadap ketimpangan struktural (Eliza et al., 2024; Azikin, 2018).

Oleh karena itu, upaya reaktualisasi dan revitalisasi Pancasila bukan hanya menjadi kebutuhan strategis, melainkan suatu keharusan sejarah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran strategis Pancasila sebagai ideologi negara dalam konteks kekinian, dengan fokus pada tiga aspek utama: pertama, menganalisis konsep dan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka; kedua, mengkaji tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi; dan ketiga, merumuskan strategi penguatan Pancasila melalui pendekatan pendidikan, keteladanan elite, dan internalisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkuat ketahanan ideologi bangsa menghadapi dinamika zaman.

Landasan Teori

Hakikat Ideologi Negara dan Konstruksi Filosofis Pancasila

Secara etimologis, istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata: *idea* yang berarti gagasan, konsep, atau buah pikiran, dan *logos* yang berarti ilmu atau pengetahuan (Sitanggang, 2024). Dalam konteks kenegaraan, ideologi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem pemikiran yang komprehensif yang berfungsi sebagai landasan filosofis bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (Nasoha et al., 2024). Lebih lanjut,

ideologi negara merupakan sekumpulan gagasan, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip dasar yang tidak hanya menjadi fondasi tetapi juga berperan sebagai pedoman yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam suatu negara (Sitanggang, 2024). Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki karakteristik khusus sebagai ideologi terbuka, yang secara fundamental berbeda dengan ideologi tertutup seperti komunisme atau fasisme (Nasoha et al., 2024). Keterbukaan ini mencerminkan sifat dinamis Pancasila yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, tanpa harus kehilangan jati diri dan nilai-nilai dasarnya yang esensial (Eliza et al., 2024). Menurut teori dimensi ideologi, keterbukaan Pancasila ini ditopang oleh tiga dimensi yang saling melengkapi: dimensi realitas yang mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar Pancasila bersumber dari kenyataan hidup yang benar-benar ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia; dimensi idealitas yang mengandung cita-cita luhur yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; serta dimensi fleksibilitas yang menunjukkan kemampuan Pancasila dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang terus berubah (Nasoha et al., 2024).

Struktur Nilai dan Fungsionalitas Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan

Secara struktural, nilai-nilai dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka dapat diklasifikasikan menjadi tiga level hierarkis. Pertama, nilai dasar yang bersifat tetap, absolut, dan tidak dapat diubah sepanjang zaman, yang tercermin dalam kelima sila Pancasila. Kedua, nilai instrumental yang bersifat dinamis dan dapat dikembangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, kebijakan negara, serta program-program pembangunan sesuai dengan tuntutan era. Ketiga, nilai praksis yang mewujudkan dalam tindakan dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari seluruh komponen bangsa (Nasoha et al., 2024). Sebagai pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*), Pancasila menjalankan berbagai fungsi strategis. Menurut Soerjanto Poespowardojo (1992), setidaknya terdapat enam fungsi ideologi Pancasila: pertama, sebagai struktur kognitif yaitu keseluruhan pengetahuan yang menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia; kedua, sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia; ketiga, sebagai sumber norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak; keempat, sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya; kelima, sebagai sumber kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk mencapai tujuan; dan keenam, sebagai sarana pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, dan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya (Nasoha et al., 2024).

Analisis Nilai-Nilai Fundamental dalam Setiap Sila Pancasila

Pancasila terdiri dari lima sila yang masing-masing mengandung nilai-nilai fundamental yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang sistematis. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai religiusitas yang menekankan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan sebagai dasar spiritualitas bangsa, sekaligus menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya (Eliza et al., 2024). Nilai religius ini merupakan landasan moral dan etika bagi seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal yang mencakup pengakuan terhadap persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama manusia, serta menegaskan pentingnya peradaban yang luhur dalam pergaulan sosial (Sucipto & Najicha, 2024). Sila ini

mengandung prinsip humanisme yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermartabat.

Sila Persatuan Indonesia merefleksikan nilai kebangsaan dan nasionalisme yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (Eliza et al., 2024). Nilai persatuan ini mengandung makna bahwa dalam usaha bersatu untuk kebulatan rakyat demi membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan prinsip demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Sucipto & Najicha, 2024). Sila ini mengandung prinsip-prinsip dasar kerakyatan, musyawarah mufakat, demokrasi, hikmat kebijaksanaan, dan perwakilan yang menjadi landasan sistem politik Indonesia. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi tujuan akhir yang menekankan pada terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial yang merata di semua bidang kehidupan (Azikin, 2018). Nilai keadilan sosial ini mengandung prinsip pemerataan dan kesetaraan yang menjadi tanggung jawab negara terhadap seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.

Tantangan Teoritis dan Kontekstualisasi Pancasila di Era Globalisasi

Dalam konteks kontemporer, Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai tantangan teoritis yang kompleks. Arus globalisasi yang membawa nilai-nilai liberalisme, kapitalisme ekstrem, dan individualisme menciptakan ketegangan filosofis dengan nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan sosial (Eliza et al., 2024). Menurut teori ketahanan ideologi, kemampuan suatu ideologi dalam mempertahankan eksistensinya sangat bergantung pada kemampuannya dalam merespons perubahan-perubahan eksternal tanpa kehilangan identitas dasarnya (Nasoha et al., 2024). Tantangan implementasi teoritis lainnya terletak pada adanya kesenjangan antara idealitas nilai-nilai Pancasila dengan realitas praktik penyelenggaraan negara. Seperti yang dikemukakan oleh Azikin (2018), dalam praktik ketatanegaraan sering terjadi distorsi dimana Pancasila hanya dijadikan "jargon" politik tanpa diimplementasikan secara substantif dalam perumusan kebijakan publik. Teori implementasi kebijakan menegaskan bahwa keberhasilan suatu ideologi dalam mempengaruhi kebijakan negara sangat ditentukan oleh konsistensi antara nilai-nilai ideologis dengan keputusan-keputusan politik yang diambil oleh para pengambil kebijakan.

Kerangka Teoritis untuk Penguatan dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila

Berdasarkan analisis teoritis, penguatan Pancasila sebagai ideologi negara memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensi. Teori pendidikan kewarganegaraan menekankan pentingnya internalisasi nilai melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal yang berkelanjutan (Sitanggang, 2024). Sementara teori kepemimpinan menegaskan peran strategis elite politik dan tokoh masyarakat dalam memberikan keteladanan implementasi nilai-nilai Pancasila (Azikin, 2018). Teori sosial budaya menggarisbawahi pentingnya reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kekinian melalui revitalisasi praktik-praktik budaya lokal yang sejalan dengan semangat Pancasila, seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi (Nasoha et al., 2024). Sedangkan teori komunikasi ideologi menekankan perlunya pengemasan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk narasi yang relevan dengan tantangan zaman, serta penggunaan media yang efektif untuk menyampaikannya kepada generasi muda (Eliza et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) yang mendalam dan komprehensif. Pendekatan metodologis ini dipilih karena sesuai dan relevan dengan tujuan penelitian untuk memahami secara mendalam, holistik, dan interpretatif tentang peran, nilai, tantangan, dan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara, dengan menganalisis berbagai sumber tertulis yang terpercaya dan relevan (Sitanggang, 2024). Penelitian kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali makna, memahami konteks, dan mengkonstruksi pemahaman yang utuh tentang fenomena Pancasila sebagai ideologi dalam perspektif yang multidimensional. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen yang sistematis dan telaah kepustakaan mendalam terhadap berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti artikel jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan internasional, buku-buku referensi, prosiding seminar, dokumen kebijakan pemerintah, publikasi resmi lembaga negara, serta sumber-sumber literatur lainnya yang membahas tentang Pancasila, ideologi negara, filsafat politik, dan dinamika implementasinya di berbagai era pemerintahan (Eliza et al., 2024; Sucipto & Najicha, 2024). Sumber-sumber tersebut diseleksi secara ketat berdasarkan kredibilitas, reputasi penulis, relevansi dengan fokus penelitian, dan kedalaman analisis yang ditawarkan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) yang dilakukan secara sistematis, interpretatif, dan berjenjang. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan beberapa pendekatan analitis yang saling melengkapi untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan bernuansa, yaitu:

1. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Digunakan untuk mengkaji secara kritis dan merumuskan definisi operasional, hakikat, karakteristik, dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila sebagai sebuah ideologi negara dalam perspektif teoretis dan filosofis (Nasoha et al., 2024). Pendekatan ini membantu dalam membangun kerangka konseptual yang solid untuk memahami Pancasila secara utuh.
2. Pendekatan Historis (Historical Approach). Diterapkan untuk menelusuri secara kronologis dan tematis perkembangan, dinamika, perubahan penafsiran, dan implementasi Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, dari masa pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi dengan segala kompleksitasnya (Azikin, 2018). Pendekatan historis memungkinkan pemahaman tentang kontinuitas dan diskontinuitas dalam pemaknaan Pancasila.
3. Pendekatan Normatif Yuridis (Normative Juridical Approach). Digunakan untuk menganalisis keterkaitan, konsistensi, dan ketidaksesuaian antara nilai-nilai Pancasila dengan peraturan perundang-undangan, konstitusi, serta kebijakan pemerintahan yang diterapkan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia (Azikin, 2018). Pendekatan ini mengungkap kesenjangan antara idealitas dan realitas implementasi Pancasila.
4. Analisis Komparatif (Comparative Analysis). Dilakukan dengan membandingkan secara kritis tantangan, respon, dan upaya implementasi nilai-nilai Pancasila di masa lalu dengan konteks kekinian, khususnya dalam menghadapi era globalisasi, disrupsi digital, dan masyarakat 5.0, untuk mengidentifikasi persoalan, peluang, dan solusi yang relevan dan kontekstual (Eliza et al., 2024). Analisis komparatif ini memberikan perspektif dinamis tentang adaptasi Pancasila.
5. Analisis Kritis (Critical Analysis). Digunakan untuk mengevaluasi secara kritis berbagai wacana, diskursus, dan narasi tentang Pancasila yang berkembang dalam khazanah pemikiran Indonesia, termasuk kecenderungan dominan, bias interpretasi, dan kepentingan politik yang melatarbelakangi berbagai penafsiran terhadap ideologi Pancasila (Azikin, 2018). Analisis kritis membuka ruang untuk dekonstruksi dan rekonstruksi pemahaman tentang Pancasila.

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis: pertama, reduksi data dengan menyeleksi dan memfokuskan pada data yang paling relevan; kedua, penyajian data dalam bentuk matriks analitis dan narasi deskriptif; ketiga, penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan penelitian (Sitanggang, 2024). Melalui sintesis dari berbagai pendekatan analisis tersebut, penelitian ini berupaya untuk menyajikan sebuah pemahaman yang utuh, komprehensif, kritis, dan kontekstual mengenai relevansi, tantangan, dan strategi penguatan Pancasila sebagai ideologi negara di tengah kompleksitas tantangan zaman dan perubahan sosial yang cepat dan tidak terduga.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Konseptual tentang Pancasila sebagai Ideologi Terbuka yang Dinamis

Berdasarkan analisis literatur yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan sekadar kumpulan prinsip statis, melainkan sebuah ideologi terbuka yang memiliki kapasitas dinamis untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai dasarnya (Nasoha et al., 2024). Karakter keterbukaan ini merupakan kekuatan fundamental yang membedakannya secara tegas dari ideologi tertutup seperti komunisme atau fasisme, yang cenderung kaku dan dogmatis. Kemampuan adaptif ini secara struktural ditopang oleh tiga lapisan nilai yang saling berkaitan: nilai dasar yang bersifat tetap dan absolut sebagai fondasi, nilai instrumental yang fleksibel dan dapat dikembangkan dalam bentuk peraturan dan kebijakan sesuai tuntutan era, serta nilai praksis yang mewujudkan dalam tindakan dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari (Nasoha et al., 2024). Sebagai pandangan hidup bangsa (*weltanschauung*), Pancasila berfungsi ganda: sebagai pedoman normatif yang mengarahkan perilaku, dan sebagai kerangka kognitif yang menjadi landasan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mempersepsikan, memahami, dan menafsirkan realitas dunia serta berbagai peristiwa di sekitarnya (Sitanggang, 2024). Fungsi ini mencakup enam aspek utama, mulai dari sebagai struktur kognitif, orientasi dasar, norma pedoman, penemu identitas, pemberi semangat, hingga sebagai sarana pendidikan (Nasoha et al., 2024).

Dinamika Historis, Manipulasi, dan Tantangan Kontemporer Implementasi

Secara historis, perjalanan implementasi Pancasila sebagai ideologi negara menunjukkan dinamika yang kompleks dan mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada berbagai periode pemerintahan, nilai-nilai luhur Pancasila sering kali diinterpretasikan secara sempit, diselewengkan, dan dimanipulasi untuk kepentingan politik praktis dan legitimasi kekuasaan rezim yang berkuasa (Azikin, 2018). Pada masa Orde Baru, misalnya, Pancasila digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan yang sentralistik dan represif melalui program P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), sementara di era Reformasi, sebagai reaksi balik terhadap masa lalu, Pancasila justru mengalami marginalisasi, dianggap sebagai produk Orde Baru, dan dianggap kehilangan relevansi praktisnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Azikin, 2018; Sucipto & Najicha, 2024). Tantangan kontemporer yang paling signifikan dan multidimensi datang dari arus globalisasi dan revolusi digital. Globalisasi membawa serta nilai-nilai individualisme, konsumerisme, materialisme, dan liberalisme ekstrem yang berpotensi menggerus semangat persatuan, kegotongroyongan, dan keadilan sosial yang menjadi jiwa Pancasila (Eliza et al., 2024). Selain itu, lemahnya pemahaman substantif masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, terhadap esensi dan filsafat nilai-nilai Pancasila, serta ketidakmampuan mentransformasikannya dalam konteks kekinian, menjadi faktor penghambat internal yang serius dan mengkhawatirkan (Sitanggang, 2024). Tantangan ini diperparah dengan maraknya hoaks, politik identitas, dan radikalisme yang mengancam persatuan nasional (Eliza et al., 2024).

Relevansi Strategis dan Strategi Penguatan Holistik di Era Global

Meskipun menghadapi berbagai tantangan berat, nilai-nilai Pancasila justru semakin menemukan relevansi strategisnya sebagai filter budaya (cultural filter) dan panduan moral (moral compass) di tengah gempuran pengaruh global yang seringkali tidak tersaring (Eliza et al., 2024). Sila Persatuan Indonesia dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai benteng kokoh terhadap ancaman disintegrasi bangsa, sektarianisme, dan politik identitas yang sempit. Sementara itu, Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia berfungsi sebagai korektor fundamental terhadap kesenjangan dan ketimpangan struktural yang dihasilkan oleh sistem ekonomi pasar bebas yang kapitalistik (Azikin, 2018). Untuk memperkuat implementasinya secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan strategi yang komprehensif, holistik, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, Pendidikan memegang peran kunci dan strategis, baik melalui pendidikan formal di semua jenjang (sekolah dan perguruan tinggi) yang mengintegrasikan nilai Pancasila dalam kurikulum dan metode pembelajaran, maupun melalui pendidikan informal dalam keluarga dan masyarakat yang menekankan pada keteladanan dan pembiasaan (Sitanggang, 2024; Sucipto & Najicha, 2024). Selain itu, keteladanan para elite politik, birokrasi, dan tokoh masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik yang benar-benar berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, serta menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), merupakan prasyarat mutlak yang tidak bisa ditawar (Azikin, 2018). Yang tidak kalah penting adalah internalisasi nilai ke dalam kehidupan sehari-hari seluruh warga negara, yang diwujudkan melalui praktik nyata seperti gotong royong, toleransi aktif, musyawarah untuk mufakat, dan sikap menghargai hak orang lain (Nasoha et al., 2024; Eliza et al., 2024). Sinergi yang erat dan berkelanjutan antara pemerintah, dunia pendidikan, institusi sosial, media massa, dan seluruh elemen masyarakat inilah yang menjadi kunci penentu utama untuk memastikan bahwa Pancasila tidak hanya bertahan sebagai simbol dan slogan, tetapi benar-benar hidup, bernafas, dan diamalkan dalam setiap denyut nadi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia (Sitanggang, 2024).

KESIMPULAN

Pancasila merupakan ideologi terbuka dan dinamis yang berfungsi sebagai fondasi filosofis, moral, dan normatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki struktur nilai yang terdiri dari nilai dasar, instrumental, dan praksis, yang memungkinkannya beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Namun, implementasi Pancasila menghadapi tantangan serius, baik secara historis maupun kontemporer. Pada masa lalu, Pancasila sering dimanipulasi untuk kepentingan politik, sementara di era globalisasi dan revolusi digital saat ini, Pancasila menghadapi gempuran nilai-nilai individualisme, konsumerisme, radikalisme, serta disrupsi media sosial yang mengancam persatuan dan keadilan sosial. Meskipun demikian, nilai-nilai Pancasila justru semakin relevan sebagai filter budaya dan kompas moral di tengah arus globalisasi. Untuk memperkuat eksistensi dan implementasinya, diperlukan strategi yang holistik dan berkelanjutan, meliputi:

1. Pendidikan yang mengintegrasikan nilai Pancasila dalam kurikulum dan praktik pembelajaran;
2. Keteladanan elite politik dan tokoh masyarakat dalam merumuskan kebijakan yang berlandaskan Pancasila;
3. Internalisasi nilai dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik gotong royong, toleransi, musyawarah, dan keadilan sosial.

Dengan sinergi antar pemangku kepentingan, Pancasila tidak hanya akan bertahan sebagai simbol, tetapi benar-benar hidup dan diamalkan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Azikin, A. (2018). Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(2), 77–90.
- Eliza, K. M., Sari, S., Hellenia, S., Tianasati, F., & Hasan, Z. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dalam Kehidupan Masyarakat Di Era Globalisasi. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(2), 341-350.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Pratiwi, D. I., Putri, S. R., & Naim, S. A. (2024). Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa: Perwujudan Nilai Budaya dan Konsensus Dalam Keberagaman Indonesia. *Majelis*, 1(4), 68-84.
- Sitanggang, R. M. (2024). Pancasila Sebagai Ideologi Negara Landasan Implementasi dan Relevansi di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Kutei*, 23(2), 277-286.
- Sucipto, G. D., & Najicha, F. U. (2024). Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Dasar Negara. *CIVICS: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 397-403.